

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan pembangunan kesehatan kepada masyarakat yaitu dengan membuat Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas). Puskesmas merupakan suatu unit organisasi pelayanan kesehatan terunggul secara menyeluruh dan juga terpadu untuk masyarakat yang tinggal di wilayah kerja tertentu. Kegiatan pokok yang dilakukan oleh puskesmas dalam upaya pemulihan kesehatan salah satunya adalah memberikan pengobatan. Pengobatan merupakan kegiatan penting puskesmas sehingga obat-obatan pun menjadi unsur penting yang tidak dapat digantikan (*Renaldi et al, 2017*).

Obat menduduki peranan penting dalam terapi sebagai salah satu indikator keberhasilan suatu pengobatan yang dilakukan di fasilitas kesehatan termasuk puskesmas. Ketersediaan obat yang ada di sarana pelayanan kesehatan masyarakat tentu harus didasari pada pengelolaan obat yang tepat agar terciptanya ketersediaan obat yang sesuai dengan kebutuhan karena ada tidaknya ketersediaan obat yang tepat menjadi cerminan baik atau buruknya mutu pengelolaan suatu obat di fasilitas kesehatan tersebut. Adanya Kebijakan Obat Nasional (KONAS) menjadi pendukung terjaminnya ketersediaan obat dari berbagai macam segi baik jumlah dan jenis yang mencukupi, pemerataan, pendistribusian dan penyerahan obat yang harus sesuai dengan kebutuhan masing-masing puskesmas.

Pengelolaan obat di puskesmas perlu diteliti karena pengelolaan obat yang efisien sangat menentukan keberhasilan manajemen puskesmas secara keseluruhan, untuk menghindari perhitungan kebutuhan obat yang tidak akurat

dan tidak rasional sehingga perlu dilakukan pengelolaan obat yang sesuai. Pengelolaan obat bertujuan untuk menjamin kelangsungan ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan obat yang efisien, efektif, dan rasional. Aspek pengelolaan obat yang perlu dikaji diantaranya meliputi perencanaan obat, pengadaan obat, penerimaan obat, penyimpanan obat, distribusi obat, pemakaian obat, pencatatan dan pelaporan obat (Anonim, 2004).

Penelitian mengenai evaluasi standar pelayanan kefarmasian di Puskesmas sebelumnya sudah dilangsungkan *Dianita et al* (2017) di Puskesmas Kabupaten Magelang menggunakan metode survey 3 dan observasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, didapatkan hasil bahwa pelayanan kefarmasian di Puskesmas Kabupaten Magelang pada indikator visite pasien serta sarana dan prasarana masih perlu dimaksimalkan sehingga belum sesuai dengan Standar Pelayanan Kefarmasian pada Permenkes No. 74 Tahun 2016.

Penelitian lain yang juga pernah dilakukan oleh *Dewi et al* (2020) di 11 Puskesmas Kota Denpasar memperlihatkan hasil bahwa penerapan standar pelayanan kefarmasian di Puskesmas Kota Denpasar pada aspek pengelolaan obat dan bahan medis habis pakai sebesar 96,97%, aspek pelayanan farmasi klinis sebesar 63,85%, aspek Sumber Daya Kefarmasian sebesar 73,58% dan aspek pengendalian mutu pelayanan kefarmasian sebesar 82,68%.

Pelayanan puskesmas yang baik antara lain tergantung pada pengelolaan obat secara tepat dan benar. Ketepatan dan kebenaran

pengelolaan obat di puskesmas akan berpengaruh terhadap ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan secara keseluruhan di kabupaten atau kota. Berdasarkan hal tersebut maka perlu diteliti ketepatan mekanisme pengelolaan obat berdasarkan standar pengelolaan obat yang baik. Suatu pelayanan puskesmas yang baik tidak hanya tergantung pada pengelolaan obat secara tepat dan benar. Akan tetapi, dapat juga diukur dari kesesuaian pengelolaan obat yang ada di puskesmas dengan standar pengelolaan obat yang ditetapkan pada kabupaten tersebut. Adanya kesesuaian dengan standar ini dapat digunakan untuk mengantisipasi apa yang terjadi di lapangan dan dapat menjadi pedoman bagi petugas pengelola obat di kabupaten/kota maupun puskesmas dalam melaksanakan tugas sehari-hari (Anonim,2004).

Pentingnya pengelolaan obat sendiri adalah untuk menjamin tercapainya ketepatan jumlah dan jenis perbekalan farmasi dan alat kesehatan, dengan memanfaatkan sumber-sumber yang tersedia seperti tenaga, dana, sarana, dan perangkat lunak (metode dan tata laksana) dalam upaya mencapai tujuan yang ditetapkan di berbagai tingkat unit kerja (Anonim, 2009).

Pemilihan / seleksi adalah tahapan awal dalam perencanaan obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP). Prinsip dasar seleksi adalah obat dan BMHP terpilih harus mempunyai manfaat terapi yang jauh lebih besar dibandingkan risikonya serta merupakan yang terbaik dibanding kompetitornya. Pemilihan ini bertujuan untuk menentukan jenis obat BMHP yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan serta pelaksanaan intervensi program kesehatan dalam menunjang pencapaian target pembangunan kesehatan. Pada proses pemilihan obat seharusnya

mengikuti pedoman seleksi obat, antara lain; memilih obat yang tepat dan terbukti efektif serta merupakan *Drug of choice*, memilih seminimal mungkin obat untuk suatu jenis penyakit dan mencegah duplikasi, melakukan monitoring kontra indikasi dan efek samping obat secara cermat untuk mempertimbangkan penggunaannya, biaya obat yang secara klinik sama harus dipilih yang termurah, menggunakan obat dengan nama generic. (Aprilliani and Pratiwi, 2018).

Suatu perencanaan obat dilakukan bagi pemenuhan kebutuhan obat di sebuah sarana pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan yang mudah dijumpai yaitu salah satunya adalah puskesmas. Sebelumnya melakukan perencanaan obat di puskesmas terlebih dahulu pengadaannya dilakukan oleh Dinas Kesehatan setempat, namun di era Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) saat ini, Puskesmas di mudahkan dalam pengelolaan logistic yaitu dengan melakukan perencanaan dan pengadaan sendiri, sehingga dalam penanganan masalah obat puskesmas lebih optimal dalam pengelolaannya. Kegiatan ini sangat didukung dengan tersedianya dana kapitasi yang diserahkan langsung ke Puskesmas oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (Emilia et al., 2018).

Perencanaan dan pengadaan kebutuhan obat yang akan datang berdasarkan banyaknya jumlah pasien per tahun dengan keluhan penyakit tertentu, maka diketahui jenis obat apa yang banyak digunakan untuk mengatasi keluhan tersebut dan berapa banyak jumlah obat yang dibutuhkan. Penentuan jenis obat dan jumlah obat yang digunakan juga dilihat berdasarkan jenis penyakit yang dominan dan jenis pelayanan apa yang banyak dilakukan dalam kegiatan pelayanan perawatan dan pengobatan. Sebelum melakukan permintaan obat, terlebih dahulu dilakukan pembuatan Lembar Permintaan dan Lembar Pemakaian Obat (LPLPO) yang akan

diusulkan ke Dinas Kesehatan untuk melakukan pengadaan obat yang telah ditentukan. Obat yang sering digunakan akan menjadi prioritas untuk diusulkan oleh puskesmas ke Dinas Kesehatan (*Emilia et al.*, 2018)

Proses perencanaan dan pengadaan obat yang diteliti oleh *Sulrieni and Rozalina* (2019) di Puskesmas Lubuk Buaya, menunjukkan bahwa Puskesmas Lubuk Buaya melakukan perencanaan obat berdasarkan kebutuhan sebelumnya atau metode konsumsi dan ada yang berdasarkan pola penyakit. Perencanaan obat dilakukan oleh Apoteker, Dokter Umum, Dokter Gigi dan ada yang dari coordinator program. Menurut beberapa informan terdapat kendala/masalah didalam perencanaan dan pengadaan obat di puskesmas Lubuk Buaya yaitu dikarenakan sistem E-Katalog yang sudah ditetapkan dari Dinas Kesehatan dalam pengadaan obat, hal ini mengakibatkan terjadinya kekosongan dan keterlambatan kedatangan obat dan berdampak kepada pasien.

Penerimaan obat merupakan proses yang penting dalam pengelolaan obat, sebab kegiatan penerimaan obat bertujuan untuk memastikan keadaan barang yang diterima sesuai dengan yang tertera di surat pesanan ataupun kontrak yang meliputi jenis, spesifikasi, jumlah, mutu, waktu penyerahan, dan harga barang. (*Day et al.*, 2020).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh *Mailoor et al.* (2019) didapati puskesmas Danowudu Kota Belitung dalam penerimaan obat pernah terjadi ketidaksesuaian dalam penerimaan obat di puskesmas. Hal ini disebabkan oleh petugas dinas kesehatan yang salah dalam pengangkutan sehingga obat yang diterima tidak sesuai dengan permintaan. Hal ini seharusnya tidak terjadi di puskesmas, puskesmas perlu memperhatikan dalam penerimaan

obat dan juga bagi Dinas Kesehatan kota Belitung harus lebih teliti agar penerimaan obat di puskesmas terhindar dari ketidaksesuaian.

Proses penyimpanan obat merupakan suatu kegiatan pengaturan terhadap obat yang diterima agar aman (tidak hilang), terhindar dari kerusakan fisik maupun kimia dan mutunya tetap terjamin, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Tujuannya adalah agar mutu obat yang tersedia di Puskesmas dapat dipertahankan sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. (*Rismalawati et al.*, 2015).

Penelitian yang dilakukan oleh *Dampung et al.* (2019) tentang gambaran manajemen obat dinas kesehatan kota Makassar menyatakan bahwa manajemen obat di gudang obat dinas kesehatan kota Makassar belum memenuhi standar, dilihat dari luas gudang penyimpanan obat di Dinas Kesehatan Kota Makassar belum cukup untuk menyimpan obat dengan baik karena masih ada obat-obatan yang diletakkan di lantai tidak menggunakan pallet dan tidak beraturan dikarenakan luas gudang dan fasilitas penyimpanan di gudang obat masih terbatas. Selain itu, masih terdapat atap ruangan yang bocor sehingga pada saat hujan bisa terjadi menimbulkan masuknya air dalam gudang penyimpanan. Selain itu, alas an belum dilakukannya perbaikan gudang penyimpanan karena adanya wacana pemindahan lokasi gudang ke tempat yang baru yang letaknya di sekitar kantor utama Dinas Kesehatan Kota Makassar.

Pengelolaan obat yang kurang baik seperti yang diungkapkan diatas tentunya dapat membawa kerugian yang cukup besar kepada Puskesmas, Pengelolaan obat merupakan salah satu aspek penting dari Puskesmas apalagi di masa Pandemi Covid seperti sekarang, karena manajemen logistic merupakan salah satu penyebab terjadinya ketidakefisienan di Puskesmas

yang mana akan memberikan dampak yang buruk terhadap biaya operasional yang akan dikeluarkan oleh Puskesmas, karena bahan logistic obat merupakan salah satu tempat kebocoran anggaran, sedangkan ketersediaan obat saat ini menjadi tututan pelayanan kesehatan.

Pengelolaan obat di puskesmas perlu diteliti karena pengelolaan obat yang efisien sangat menentukan keberhasilan manajemen puskesmas secara keseluruhan, untuk menghindari perhitungan kebutuhan obat yang tidak akurat dan tidak rasional sehingga perlu dilakukan pengelolaan obat yang sesuai. Pengelolaan obat bertujuan untuk menjamin kelangsungan ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan obat yang efisien, efektif, dan rasional. Aspek pengelolaan obat yang perlu dikaji diantaranya meliputi perencanaan obat, pengadaan obat, penerimaan obat, penyimpanan obat, distribusi obat, pemakaian obat, pencatatan dan pelaporan obat (Anonim, 2004).

Islam juga memerintahkan umatnya untuk melakukan pengobatan yang dijelaskan dalam Hadist sebagai berikut :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَّاسِطِيِّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَحْبَبْنَا إِسْمَاعِيلَ بْنَ عَيْشٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالِدَوَاءَ وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوَوْا وَلَا تَدَاوَوْا بِحَرَامٍ سِخْرٍ  
(رواه أبو داود)

*“Telah disampaikan kepada kami oleh Muhammad bun Ubadah al- Wustha, telah menyampaikan kepada kami Yazid bin Harun, telah mengabarkan kepada kami Ismail bin Iyasy dari Ts’labah bin Muslim dari Imran al-Anshari dari Abi al-Darda’ dari ayahnya dia berkata, Rasulullah saw telah bersabda*

*“Sesungguhnya Allah menurunkan penyakit dan obat dan menciptakan untuk tiap penyakit ada obatnya, maka berobatlah dan jangan berobat dengan sesuatu yang haram” (HR. Abu Daud, Juz 10, no 3376).*

Pelajaran yang bisa diambil yaitu setiap penyakit yang diterima manusia adalah suatu ujian dari Allah dan setiap penyakit Allah juga telah menurunkan obatnya, sehingga kita sebagai makhluk ketika telah menerima ujian dari Allah berupa penyakit maka dianjurkan untuk melakukan pengobatan, salah satunya yaitu melakukan pengobatan di fasilitas kesehatan salah satunya yaitu Puskesmas.

Puskesmas Plaosan merupakan salah satu puskesmas pemerintah Kota Magetan yang mencakup 13 kelurahan yang ada di Kecamatan Plaosan yang jumlah penduduknya mencapai 52.565 jiwa . Puskesmas Plaosan terletak di ujung barat kecamatan Plaosan di kaki gunung lawu yang menjadi satu satunya Pusat Kesehatan Masyarakat Plaosan. Puskesmas Plaosan merupakan Puskesmas Rawat Inap dan Rawat Jalan yang menjadi Rujukan sebagian besar masyarakat Kecamatan Plaosan. Maka Pengelolaan Obat di Instalasi Farmasi Puskesmas Plaosan harus dilakukan dengan Baik sehingga dapat memberikan pelayanan yang efektif dan efisien kepada Pasien.

Sumber Daya Kefarmasian meliputi Sumber Daya Manusia serta saran dan prasarana. Pelaksanaan pelayanan kefarmasian di Puskesmas sekurangnya oleh 1 Apoteker yang berperan sebagai penanggung jawab dan disokong oleh Tenaga Teknis Kefarmasian sesuai keperluan. Sarana dan prasarana dibutuhkan untuk membantu kelancaran pelayanan kefarmasian di Puskesmas mencakup ruang penerimaan resep, ruang pelayanan resep dan peracikan, ruang penyerahan obat, ruang 17 konseling, ruang penyimpanan obat dan Bahan Medis Habis Pakai serta ruang arsip (Depkes RI, 2016).

Di Puskesmas Plaosan terdapat 1 Apoteker dan 2 Tenaga Teknis



Kefarmasian. karena keterbatasan dari Sumber Daya Manusia di Instalasi Farmasi Puskesmas Plaosan bisa menjadi faktor kurang maksimalnya pengelolaan obat di Instalasi Farmasi Puskesmas Plaosan. Selain karena keterbatasan dari SDM, penelitian mengenai pengelolaan obat di instalasi farmasi puskesmas plaosan berdasarkan Permenkes Nomor 74 Tahun 2016 belum dilakukan, maka Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Evaluasi Pengelolaan Obat di Instalasi Farmasi Puskesmas Plaosan Kabupaten Magetan”.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran pengelolaan obat di Instalasi Farmasi Puskesmas Plaosan Kabupaten Magetan sesuai dengan Standar Permenkes No.74 Tahun 2016.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang maka rumusan masalah penelitian ini yaitu “Bagaimana Gambaran Pengelolaan Obat di Instalasi Farmasi Puskesmas Plaosan Kabupaten Magetan sesuai Standar Permenkes No.74 Tahun 2016 ?”



### C. Keaslian Penelitian

**Tabel 1.** Keaslian Penelitian

No	Penulis/Tahun	Judul	Hasil Penelitian	Implikasi dan rekomendasi	Perbedaan dengan Penelitian ini
1.	<i>Mailoor et al., 2019</i>	Analisis Pengelolaan Obat di Puskesmas Danowodu Kota Bitung	Pengelolaan obat di Puskesmas Danowudu belum terlaksana dengan baik sesuai dengan Permenkes nomor 74 tahun 2016 tentang Standar pelayanan kefarmasian di Puskesmas. Kurangnya perhatian dari pihak-pihak terkait menyebabkan beberapa kegiatan yang seharusnya dilaksanakan tidak dapat terlaksana, serta penggolongan obat di Puskesmas belum terlaksana dengan baik karena kekurangan sumber daya manusia menyebabkan system	pengelolaan obat di Puskesmas Danowudu harus menjadi perhatian demi terlaksananya Permenkes tentang Standar pelayanan kefarmasian di Puskesmas demi kelancaran pelayanan kesehatan di Puskesmas Danowudu, serta dapat meningkatkan manajemen pengelolaan obat di Puskesmas agar dapat tercapainya pelayanan kesehatan yang optimal di	Perbedaan Waktu, Tempat dan Obyek Penelitian.

			manajemen pengelolaan obat di puskesmas tidak berjalan optimal.	Puskesmas Danowudu. Puskesmas perlu mempertahankan manajemen pengelolaan obat yang sudah tepat dan mengevaluasi yang kurang	
2.	Debby I.T. Mamahit. Dkk (2017)	Analisis Proses Penyimpanan Obat di Puskesmas Pingkan Tenga Kecamatan Tenga	Tatacara penyimpanan obat yang memiliki waktu kadaluarsa belum sesuai dengan pedoman. Pengamanan mutu sudah sesuai dengan pedoman	Instalasi Farmasi Puskesmas Pingan Tenga harus meningkatkan proses penyimpanan dengan metode First Expired First Out agar tidak terjadi penumpukan stok obat kadaluarsa.	Perbedaan Waktu, Tempat, dan Obyek Penelitian. Yang diteliti hanya Proses Penyimpanan.
3.	Renaldi and Nanda, 2017	Manajemen Pengelolaan obat di Puskesmas Limapuluh Kota	Perencanaan obat berdasarkan Laporan Pemakaian dan Lembar Permintaan Obat (LPLPO) rutin sekali setahun dan perencanaan berkala pertriwulan. Perhitungan obat berdasarkan metode	Diharapkan Dinas Diharapkan agar Puskesmas lebih meningkatkan koordinasi antara petugas penanggung jawab gudang dengan petugas poli dan	Perbedaan Waktu, Tempat, dan Obyek Penelitian.

		Pekanbaru Tahun 2017	konsumsi dan campuran. Penyimpanan obat Puskesmas Limapuluh belum sepenuhnya optimal	mengoptimalkan pencatatan, pelaporan dan penyimpanan obat agar Manajemen Pengelolaan Obat sesuai dengan apa yang diharapkan kedepannya.	
4.	<i>Emilia et al., 2018</i>	Manajemen Pengelolaan Obat di Puskesmas Lambunu 2 Kabupaten Parigi Moutong	Input yang ditinjau yaitu dari SDM masih kurang/tidak sesuai basic atau profesi, sarana dan prasarana pelayanan obat belum memadai, dan anggaran pengelolaan obat sudah tersedia, kedua dari proses yaitu pengelolaan obat sudah baik, pengadaan obat sudah baik, pendistribusian obat sudah baik, dan penyimpanan obat belum memadai, ketiga output yaitu pencatatan dan pelaporan sudah baik.	Baik pihak instansi Puskesmas Lambunu 2 diharapkan perlu adanya koordinasi mengenai ketersediaan obat, pendistribusian obat dari dinas kesehatan ke puskesmas, dan sarana prasarana perlu di tingkatkan Puskesmas Lambunu 2 Kecamatan Bolano Lambunu Kabupaten Parigi Moutong.	Perbedaan Waktu, Tempat, dan Obyek Penelitian.
5.	Safry Afiudin	Studi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa	Dari hasil penelitian ini maka	Perbedaan Waktu,

	Samad, 2017	pengelolaan Obat di Puskesmas Batua Kota Makassar Tahun 2016	proses penentuan kebutuhan obatnya hanya menggunakan metode konsumsi. Pengadaan obat dilakukan sesuai kebutuhan di setiap bulannya dengan menggunakan LPLPO. Sarana dan prasarana yang mendukung proses penyimpanan obat sudah sesuai dengan standar. Proses pendistribusian obat dilakukan sesuai dengan protap yang telah disusun.	disarankan agar perencanaan di puskesmas Batua Kota Makassar hendaknya mengacu kepada pedoman pengelolaan yang ada serta mempertahankan pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat yang sesuai dengan pedoman pengelolaan obat.	Tempat, dan Obyek Penelitian.
--	-------------	--	--	--	-------------------------------

#### D. Tujuan Penelitian

Untuk mendapatkan gambaran mengenai pengelolaan obat yang meliputi pemilihan, perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian obat di Puskesmas Plaosan Kabupaten Magetan sesuai Standar Permenkes No.74 Tahun 2016.

#### E. Manfaat Penelitian

##### **1. Bagi Puskesmas**

Sebagai evaluasi bagi Instalasi Farmasi Puskesmas dalam meningkatkan efisiensi dan produktifitas.

##### **2. Bagi Institusi**

Menambah studi kepustakaan bagi Program Studi Farmasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

##### **3. Bagi Peneliti**

Sebagai bahan pembelajaran dan menambah pengetahuan lebih dalam bagi peneliti mengenai administrasi dan kebijakan kesehatan khususnya pengelolaan obat, dan juga merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar S.Farm.